

INDIKATOR EKONOMI KABUPATEN NATUNA TAHUN 2011

ISSN :
No. Publikasi : 9201001.2103
Katalog BPS :
Ukuran Buku : 16 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : xi + 75 Halaman

Naskah:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna

Penyunting:
Seksi Statistik Distribusi BPS Kabupaten Natuna

Gambar Kulit:
Seksi Statistik Distribusi BPS Kabupaten Natuna

Diterbitkan oleh:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

May be cited with reference to the source

KATA SAMBUTAN



BUPATI NATUNA Kata Sambutan

Dalam era pembangunan seperti sekarang ini, data statistik merupakan sesuatu yang sangat penting karena untuk memberikan gambaran objektif tentang suatu wilayah yang berkembang pesat dan masih berusia muda seperti Kabupaten Natuna. Informasi statistik yang lengkap, akurat dan komprehensif tidak hanya diperlukan Pemerintah Daerah untuk memformulasikan berbagai kebijakan, tetapi juga bagi masyarakat umum dalam memanfaatkan peluang investasi yang terbuka sangat luas di daerah ini.

Untuk itu saya menyambut gembira terbitnya publikasi **Indikator Ekonomi Kabupaten Natuna 2011** yang merupakan hasil kerjasama Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna. Saya mengharapkan agar kegiatan pengumpulan data yang berkesinambungan di setiap sektor pembangunan dapat lebih ditingkatkan lagi, sehingga kita senantiasa memiliki data yang benar untuk diinformasikan kepada masyarakat dan instansi yang memerlukan. Untuk maksud tersebut diharapkan dukungan dari semua pihak terhadap data/informasi yang diperlukan Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna bagi suksesnya penyusunan publikasi dimasa mendatang.

Akhirnya penghargaan saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya publikasi ini.

Ranai, Mei 2012
BUPATI NATUNA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Drs. H. ILYAS SABL, M.Si', written over a faint circular stamp.

Drs. H. ILYAS SABL, M.Si

KATA SAMBUTAN



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN NATUNA Kata Sambutan

Saya menyambut dengan gembira penerbitan Publikasi Indikator Ekonomi Kabupaten Natuna Tahun 2011. Publikasi ini merupakan hasil dari usaha nyata yang bersifat luas dan sinergi dalam rangka menyediakan data dan informasi yang bermanfaat.

Dengan publikasi ini setidaknya kita memiliki gambaran yang cukup komprehensif akan keadaan perekonomian di Kabupaten Natuna. Kebutuhan akan gambaran beberapa indikator ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan dan lainnya menjadi hal yang demikian penting bagi perencanaan pembangunan yang lebih baik dan sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap pembangunan yang telah dilakukan.

Keberhasilan penyusunan publikasi ini tidak terlepas dari dukungan banyak pihak. Untuk itu, kepada semua pihak yang telah ikut berperan terutama kepada BPS Kabupaten Natuna diucapkan terimakasih. Semoga Tuhan YME melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua dan semoga kehadiran publikasi ini memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Ranai, Mei 2012

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN NATUNA**

KEPALA,

H.HARDINANSYAH, SE, M.Si
NIP. 19631209 199303 1 017

KATA SAMBUTAN



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN NATUNA

Kata Pengantar

Puji dan Syukur kami persembahkan kehadiran Tuhan YME, karena atas ridho dan karunia-Nya sehingga publikasi “Indikator Ekonomi Kabupaten Natuna Tahun 2011” ini bisa dapat diselesaikan.

Topik yang diangkat dalam publikasi ini mengenai kondisi perekonomian di Kabupaten Natuna. Secara khusus, publikasi ini membahas tentang pertumbuhan ekonomi, perkembangan harga bahan pokok, pertanian, pariwisata, ketenagakerjaan dan beberapa indikator ekonomi lainnya.

Data yang digunakan untuk penulisan publikasi ini terutama berasal dari survei BPS Kabupaten Natuna. Untuk melengkapi hasil analisis dan perhitungan juga digunakan data dan informasi dari berbagai instansi lainnya.

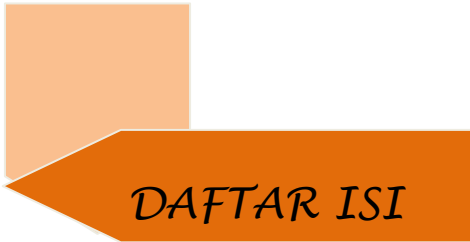
Demikian publikasi ini disusun, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Ranai, Mei 2012
BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN NATUNA
KEPALA,



ENDRA, SE

NIP. 19641003 198603 1 004



	Halaman
Kata Sambutan Bupati Natuna	ii
Kata Sambutan Kepala Bappeda Kabupaten Natuna	iii
Kata Pengantar Kepala BPS Kabupaten Natuna	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Tujuan dan Manfaat	6
1.3 Sumber Data	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II METODOLOGI	10
2.1 Konsep dan Defenisi	11
2.2 Formula Perhitungan	14
2.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	14
BAB III PERTANIAN	18
3.1 Sub Sektor Tanaman Pangan	19
3.2 Sub Sektor Perkebunan	23
3.3 Sub Sektor Peternakan	26

DAFTAR ISI

3.4 Sub Sektor Perikanan	27
BAB IV PARIWISATA	32
4.1 Perhotelan	33
BAB V KETENAGAKERJAAN	37
5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	39
5.2 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	41
5.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	42
5.4 Tingkat Setengah Pengangguran	43
5.5 Lapangan Usaha	44
5.6 Status Pekerjaan	45
BAB VI PERDAGANGAN	47
6.1 Perkembangan Harga Bahan-Bahan Pokok Kabupaten Natuna	49
BAB VII ANALISIS PDRB	52
7.1 Laju Pertumbuhan Eonomi (LPE)	53
7.2 Struktur Perekonomian	57
BAB VIII PENGELUARAN KONSUMSI DAN PENDAPATAN REGIONAL	61
8.1 Pengeluaran Rata-rata Konsumsi	64
8.2 Pendapatan Regonal per Kapita	67



	Halaman
Tabel 3.1 Luas Tanam Bahan Makanan menurut Komoditas dan Kecamatan Tahun 2011 (Ha)	20
Tabel 3.2 Luas Panen Bahan Makanan menurut Komoditas dan Kecamatan Tahun 2011 (Ha)	21
Tabel 3.3 Jumlah Produksi Bahan Makanan menurut Komoditas dan Kecamatan Tahun 2011 (Ton)	22
Tabel 3.4 Luas Lahan Perkebunan menurut Komoditas dan Kecamatan Tahun 2011 (Ha)	24
Tabel 3.5 Jumlah Produksi Perkebunan menurut Komoditas dan Kecamatan Tahun 2011 (Ton)	25
Tabel 3.6 Jumlah Ternak dan Unggas menurut Jenis dan Kecamatan Tahun 2011	26
Tabel 3.7 Jumlah RTP, Keramba dan Produksi Perikanan Budi-daya menurut Kecamatan Tahun 2011	28
Tabel 3.8 Jumlah RTP dan Produksi Perikanan Tangkap menurut Kecamatan Tahun 2011	29
Tabel 4.1 Banyaknya Perusahaan Akomodasi/Hotel Non Bintang menurut Kecamatan Tahun 2011	34
Tabel 4.2 Jumlah Hotel, Kamar dan Tempat Tidur Hotel dan Akomodasi di Kabupaten Natuna Tahun 2006-2011	35
Tabel 5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin Tahun 2011	41

DAFTAR TABEL

Tabel 5.2	Tingkat Kesempatan Kerja Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin Tahun 2011	42
Tabel 5.3	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin Tahun 2011	43
Tabel 5.4	Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011	45
Tabel 5.5	Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin Tahun 2011	46
Tabel 6.1	Harga Bahan-Bahan Pokok di Kabupaten Natuna Tahun 2009-2011	50
Tabel 7.1	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Natuna Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2007-2011(000Rp)	55
Tabel 7.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007-2011	56
Tabel 7.3	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Natuna Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2007-2011(000Rp)	58
Tabel 8.1	Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Natuna Tahun 2009-2011	64
Tabel 8.2	Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Non Makanan di Kabupaten Natuna Tahun 2009-2011	65
Tabel 8.3	PDRB per Kapita Kabupaten Natuna Tahun 2007-2011	68
Tabel 8.4	Pendapatan Perkapita Kabupaten Natuna Tahun 2007 - 2011	69
Tabel 8.5	Pemerataan pendapatan Kabupaten Natuna dengan Kriteria Bank Dunia Tahun 2007 -2011	75

PENDAHULUAN



*Latar Belakang, Tujuan dan Manfaat,
Sumber Data serta Sistematika Penulisan*

1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakikatnya, pembangunan merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemerataan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik secara nyata, dan dengan tingkat pemerataan yang semakin baik.

Secara nasional, visi Indonesia tahun 2010-2014 juga tetap bertumpu pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Secara lengkap visi Indonesia 2010-2014 adalah “Terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan”. Upaya untuk mewujudkannya akan dilakukan melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan budaya bangsa.

Untuk mewujudkannya maka penguatan *Triple Track Strategy* yang pernah digulirkan pada periode 2004-2009 yang dilanjutkan dengan *Grand Strategy* disertai pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. *Grand Strategy* itu adalah

1. *Pro-Growth* (meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mengedepankan investasi dan ekspor),
2. *Pro-Employment* (menggerakkan sektor riil untuk menciptakan lapangan kerja),
3. *Pro-Poor* (merevitalisasi pertanian, kehutanan, kelautan, dan ekonomi pedesaan untuk menanggulangi kemiskinan, serta program lain yang langsung menyentuh masyarakat miskin) dan
4. *Pro-Environment* (mengelola dan melindungi sumber daya alam yang ada untuk dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan serta mengembangkan pulau-pulau kecil menjadi pulau bernilai ekonomi)

Sejalan dengan semangat otonomi daerah, Pemerintah Daerah tidak lagi sebagai komponen desentralisasi administrasi dan otonomi birokrasi, tetapi sudah diberi kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Saat ini pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat seperti pada era sebelumnya, namun lebih berperan sebagai penentu kebijakan lokal daerah. Hal ini di satu sisi merupakan berkah bagi

daerah, tetapi di sisi lain merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Otonomi daerah yang dititik beratkan kepada kabupaten atau kota yang diserahkan kewenangan yang besar dengan harapan untuk yang terbawah dalam pemerintahan tersebut, yang lebih dekat dengan masyarakat akan memberikan pelayanan publik (*public service*) yang lebih efektif dan efisien dibandingkan jika diselenggarakan pada tingkat pusat. Terlepas dari adanya kelemahan-kelemahan dan polemik yang masih menyertai pelaksanaan otonomi, setiap daerah seharusnya menyambut gembira dan bertanggung jawab atas proses demokratisasi pemerintah daerah itu. Tidak terkecuali Kabupaten Natuna.

Penyelenggaraan pemerintah baik dalam menjalankan administrasi maupun pelayanan publik menjadi semakin bertumpu kepada kemampuan daerah otonom tersebut untuk secara lebih efektif mencapai tujuannya. Pencapaian tujuan dapat tergambar dari perekonomian daerah. Perkembangan ekonomi daerah dapat memberi gambaran yang lebih tentang semakin membaiknya pelayanan publik, seperti tersedianya sarana dan prasarana publik yang lebih efektif, terciptanya iklim yang kondusif untuk masyarakat menggiatkan ekonomi daerah sampai tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Sebagai suatu wujud tanggung jawab pemerintah dalam mensukseskan pembangunan yang dilakukan adalah dengan perencanaan yang terarah dan evaluasi atas hasil proses pembangunan sebelumnya. Perencanaan daerah dapat dipandang sebagai tahap awal dari serangkaian proses pembangunan yang menjadi bagian penting penentu keberhasilan pembangunan itu sendiri. Kesalahan dalam perencanaan pembangunan, tidak hanya berakibat pada ketidakberhasilan tujuan pembangunan, melainkan juga berakibat pada pemborosan sumber daya yang makin langka dan waktu yang makin terbatas. Tidak kalah penting dengan perencanaan adalah tahap evaluasi atas pembangunan. Evaluasi diperlukan sebagai umpan balik dari hasil pembangunan sebelumnya yang dijadikan dasar untuk menciptakan pembangunan yang lebih baik di masa datang.

Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah adalah dengan terciptanya keadaan ekonomi yang kondusif dan stabil. Stabilitas ekonomi yang baik sangat diperlukan bagi keberlangsungan pembangunan. Daerah dengan keadaan ekonomi yang maju relatif akan lebih berhasil dalam mendukung terciptanya berbagai kemajuan lainnya. Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa dengan ekonomi yang maju akan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam berbagai literatur ekonomi, kestabilan ekonomi biasanya digambarkan dengan berbagai indikator kunci (*key indicator*) perekonomian.

Berdasarkan aspek pendapatan, perekonomian biasanya diukur dengan

1. Tolak ukur pendapatan per kapita.
2. Pertumbuhan ekonomi,
3. Perubahan struktur ekonomi.

Sedangkan indikator kunci perekonomian yang lain adalah besaran angka inflasi, investasi, perbankan dan aspek ketenagakerjaan khususnya tingkat pengangguran.

Semua indikator kunci perekonomian tersebut sangat diperlukan pemerintah daerah, khususnya Pemerintahan Kabupaten Natuna dalam perencanaan maupun evaluasi hasil pembangunan sehingga dapat diketahui sampai dimana keberhasilannya dengan memanfaatkan instrumen indikator kunci perekonomian.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Untuk mengetahui indikator apa sajakah dan seberapa besar kemajuan atau stabilitas ekonomi itu tercapai, maka sangat diperlukan data dan informasi yang akurat. Oleh karena itu publikasi "*Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011*" ini dibuat untuk menyajikan gambaran

maupun informasi yang jelas tentang keadaan ekonomi makro Kabupaten Natuna. Dengan mengetahui berbagai kecenderungan dari indikator-indikator atau variabel-variabel ekonomi makro, diharapkan *stakeholders* dapat menetapkan kebutuhan program yang lebih tepat agar diperoleh hasil pembangunan yang lebih optimal di masa datang. Secara khusus tulisan publikasi ini bertujuan untuk melihat keadaan makro ekonomi sebagai suatu hasil yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan selama ini di Kabupaten Natuna tahun 2011, yang meliputi:

1. Menyediakan informasi tentang pertumbuhan ekonomi, struktur perekonomian pada sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Natuna,
2. Mengetahui perkembangan harga kebutuhan barang konsumsi di Kabupaten Natuna sebagai bahan evaluasi terhadap perkembangan harga secara berkesinambungan,
3. Untuk mengetahui gambaran sektor Pertanian yang merupakan sektor unggulan di Kabupaten Natuna yang memiliki kontribusi terbesar dalam perekonomian Kabupaten Natuna,
4. Melihat peran dan perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Natuna,

5. Melihat besaran pengeluaran konsumsi per kapita dan besaran pendapatan regional per kapita dan tingkat distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Natuna,
6. Situasi Ketenagakerjaan seperti partisipasi angkatan kerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan berbagai karakteristik demografinya
7. Melihat kondisi indikator makro lainnya.

1.3 Sumber Data

Sumber data dan informasi publikasi ini berasal dari berbagai sumber yang relevan untuk digunakan sebagai dasar dalam memperkirakan besaran indikator makro. Pengumpulan data ini dilakukan dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data survei seperti Survei Keuangan Daerah, SAKERNAS, SUSENAS, dan survei harga Konsumen dan Produsen Pedesaan (HD-1, HD-2, HD-3, HD-4, HD-5.1, HD-5.2, HD-6), survei ekspor-impor dan survei lain yang relevan.
2. Memanfaatkan data sekunder dari berbagai sumber baik pemerintah maupun swasta seperti laporan-laporan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), BPS Propinsi Kepulauan Riau, BPS Pusat Jakarta, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan sebagainya.

1.4 Sistematika Penulisan

Publikasi ini disusun dalam 8 (delapan) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan dan manfaat, sumber data, serta sistematika penulisan.

Bab II Metodologi yang berisi tentang penjelasan teknis perhitungan serta konsep definisi dari beberapa indikator makro.

Bab III Sektor Pertanian.

Bab IV Sektor Pariwisata yang ditinjau dari perkembangan perhotelan dan kunjungan tamu hotel/penginapan.

Bab V Ketenagakerjaan Regional berisi tentang gambaran indikator-indikator ketenagakerjaan.

Bab VI Sektor perdagangan berisi tentang perkembangan harga bahan-bahan pokok

Bab VII Analisis Produk Domestik Regional Bruto yang berisi tentang Struktur perekonomian dan Pertumbuhan Ekonomi.

Bab VIII membahas Pengeluaran Konsumsi dan Pendapatan Regional Per kapita.

METODOLOGI



*Konsep dan Definisi
Formula Perhitungan*

2.1 Konsep dan Defenisi

Berikut beberapa konsep dan defenisi yang digunakan di dalam publikasi ini,yaitu :

- * **Indikator Ekonomi** adalah ukuran-ukuran yang digunakan untuk melihat kemajuan pembangunan dibidang ekonomi pada suatu daerah atau wilayah dalam kurun waktu tertentu.
- * **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)** yaitu jumlah nilai tambah yang dihasilkan dari unit usaha (sektor-sektor ekonomi) dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.
- * **PDRB atas dasar harga berlaku** menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku setiap tahun.
- * **PDRB atas dasar harga konstan** menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu yang biasa disebut tahun dasar.

- * **Pembentukan modal tetap bruto (PMTB)** mencakup pengadaan, pembuatan, dan pembelian barang modal baru dari dalam negeri/wilayah dan barang modal baru atau bekas dari luar negeri/wilayah, yang digunakan untuk memproduksi di dalam negeri/wilayah tersebut.
- * **Pertumbuhan Ekonomi** merupakan indikator makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini biasanya digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian indikator ini digunakan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang.
- * **Struktur Ekonomi** adalah nilai tambah masing-masing sektor atau kontribusi masing-masing sektor dalam suatu perekonomian dari suatu daerah . Struktur ekonomi diperoleh dari nilai tambah masing-masing sektor dibandingkan dengan total PDRB dan dinyatakan dalam persen.
- * **PDRB per Kapita** diperoleh dari total PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, yang dapat dijadikan cerminan seberapa tinggi tingkat kemakmuran yang telah dicapai oleh penduduk suatu daerah pada periode tertentu.

- * **Indeks Harga Konsumen** adalah indeks yang mengukur perubahan harga komoditi-komoditi di suatu wilayah dalam rentang waktu tertentu.
- * **Inflasi/deflasi** dihitung berdasarkan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang merupakan salah satu indikator ekonomi populer guna mengukur tingkat perubahan harga yang terjadi pada konsumen perkotaan. Inflasi menggambarkan terjadinya kenaikan/penurunan harga dari komoditas-komoditas yang dikonsumsi oleh masyarakat secara bersamaan di suatu wilayah sehingga berdampak pada daya beli dan biaya hidup masyarakat.
- * **Angkatan Kerja** adalah mereka yang berumur 15 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik bekerja maupun sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panen, sedang cuti dan sedang menunggu pekerjaan berikutnya (contoh : pekerja bebas profesional seperti dukun dan dalang)
- * **Bukan Angkatan Kerja** adalah mereka yang berumur 15 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, atau tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori pekerja atau mencari pekerjaan.

- * **Bekerja** adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam seminggu berturut-turut dan tidak terputus (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam usaha/kegiatan ekonomi).
- * **Lapangan Pekerjaan** adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/ usaha/ perusahaan instansi tempat seseorang bekerja.

2.2 Formula Perhitungan

2.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

➤ PDRB adh berlaku

- a. **Pendekatan Produksi**, yaitu menghitung nilai tambah seluruh sektor ekonomi dimana nilai tambah tersebut merupakan hasil dari nilai produksi dikurangi biaya antaranya, dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{NTB} = \text{O}_p - \text{BA}$$

dimana: NTB = Nilai Tambah Bruto

O_p = Output/Nilai Produksi harga berlaku

BA = Biaya Antara

Jika O_p sulit diketahui karena sulit memperoleh data harga produsen, maka O_p dapat dihitung sebagai berikut:

$$O_p = O_k - MP$$

dimana:

O_p = Output/Nilai Produksi harga konsumen

MP = Marjin Perdagangan (Biaya pemasaran dan angkutan)

- b. **Pendekatan Pendapatan**, yaitu menghitung jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang terlibat dalam proses produksi.

$$NTB = UG + SU + Ptl \text{ neto} + Pst$$

dimana: UG = Upah / Gaji (balas jasa tenaga kerja)

SU = Surplus Usaha

Ptl = Pajak Tak Langsung - subsidi

Pst = Penyusutan barang modal

➤ **PDRB adh Konstan 2000**

Angka PDRB atas dasar harga Konstan sangat penting untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun. Untuk memperoleh nilai tambah sektoral atas dasar harga konstan dikenal empat macam metode penghitungan yaitu sebagai berikut :

1. **Revaluasi**, yaitu menilai produksi dan biaya antara masing-masing tahun dengan harga pada tahun dasar dan hasilnya merupakan output dan biaya antara atas dasar harga konstan. Selanjutnya nilai tambah bruto atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih antara output dan biaya antara hasil penghitungan diatas. Dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$O_k = P \times H_k$$

dimana: O_k = Output/Nilai Produksi harga konstan

P = Volume produksi tahun berjalan

H_k = Harga tahun dasar

2. **Ekstrapolasi**, Diperoleh dengan cara mengalikan nilai tambah pada tahun dasar dengan indeks produksi untuk masing-masing kegiatan/komoditas yang relevan. Indeks produksi sebagai ekstrapolator merupakan indeks dari masing-masing produksi yang dihasilkan atau indeks dari berbagai indikator produksi, jumlah tenaga kerja, jumlah perusahaan, dan lainnya sesuai dengan jenis kegiatan yang dihitung. Dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$O_k = (O_b \times I_p) / 100$$

dimana: O_k = Output/Nilai Produksi harga konstan

O_p = Output/Nilai Produksi harga berlaku

I_p = Indeks Produksi

3. **Deflasi**, Yaitu dengan cara membagi nilai tambah atas dasar harga berlaku masing-masing tahun dengan Indeks Harga Konstan atau Indeks Harga Perdagangan Besar. Dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$O_k = (O_b / I_H) \times 100$$

dimana: O_k = Output/Nilai Produksi harga konstan

O_p = Output/Nilai Produksi harga berlaku

I_H = Indeks Harga

➤ **Pertumbuhan Ekonomi**

Angka laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dihitung dengan membandingkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan. Dengan mengembangkan formula Laspeyers, yaitu :

$$LPE = \frac{(PDRB^{adhk}_n - PDRB^{adhk}_{n-1})}{PDRB^{adhk}_{n-1}} * 100\%$$

Dimana :

$PDRB^{adhk}_n$ = Nilai PDRB atas dasar harga konstan di Tahun n

$PDRB^{adhk}_{n-1}$ = Nilai PDRB atas dasar harga konstan di Tahun (n-1)

PERTANIAN



*Gambaran Umum Sektor Pertanian
Kabupaten Natuna Tahun 2011*

3

PERTANIAN

Sektor pertanian yang terdiri dari sub sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan merupakan potensi sumberdaya alam yang dapat diperbaharui (renewable resources). Adapun hasil dari sektor ini merupakan kebutuhan dasar dalam pemenuhan terhadap kecukupan gizi masyarakat sehingga dapat mengetahui tingkat ketahanan pangan di suatu daerah, selain itu juga sebagai bahan dasar dalam sektor industri pengolahan.

3.1 Sub Sektor Tanaman Pangan

Sub sektor pertanian tanaman pangan terdiri dari padi dan palawija (jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar), komoditas tersebut merupakan komponen utama penghasil karbohidrat, protein dan lemak. Jika ditinjau dari potensi lahan yang ada di Kabupaten Natuna maka sektor tanaman pangan masih dapat dikembangkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan di Kabupaten Natuna.

PERTANIAN

Tabel 3.1 Luas Tanam Bahan Makanan menurut Komoditas dan Kecamatan Tahun 2011 (Ha)

Kecamatan	Padi	Jagung	UbiKayu	UbiJalar	Talas	Kacang Tanah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Midai	-	6	17	17	16	6
2. Bunguran Barat	65	17	12	12	-	9
3. Bunguran Utara	26	2	21	2	-	-
4. PulauLaut	-	-	-	-	-	-
5. PulauTiga	-	-	-	-	-	-
6. BunguranTimur	11	2	8	-	-	-
7. BunguranTimur Laut	-	7	7	5	-	-
8. Bunguran Tengah	46	25	21	16	2	18
9. Bunguran Selatan	-	7	5	3	1	2
10. Serasan	-	26	57	27	-	13
11. Subi	-	1	1	-	-	-
12. SerasanTimur	40	38	62	42	-	31
2011	188	131	211	124	19	79
2010	311	300	212	33	100	38

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Natuna

Pada tahun 2011 beberapa komoditas tanaman pangan yang ada di Kabupaten Natuna ada yang mengalami peningkatan jika ditinjau dari luas tanamnya, komoditas yang mengalami peningkatan tersebut adalah tanaman ubi jalar dan kacang tanah. Sedangkan komoditas padi, jagung dan ubi kayu serta talas justru mengalami penurunan luas tanam.

PERTANIAN

Tabel 3.2 Luas Panen Bahan Makanan menurut Komoditas dan Kecamatan Tahun 2011 (Ha)

Kecamatan	Padi	Jagung	UbiKayu	UbiJalar	Talas	Kacang Tanah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Midai	-	4	12	17	12	4
2. Bunguran Barat	40	12	6	7	-	4
3. Bunguran Utara	10	1	9	2	-	-
4. PulauLaut	-	-	-	-	-	-
5. PulauTiga	-	-	-	-	-	-
6. BunguranTimur	11	2	5	-	-	-
7. BunguranTimur Laut	-	5	6	4	-	-
8. Bunguran Tengah	11	21	17	8	1	11
9. Bunguran Selatan	-	4	3	2	1	2
10. Serasan	-	18	39	20	-	13
11. Subi	-	1	1	-	-	-
12. SerasanTimur	5	33	55	31	-	22
2011	77	101	153	91	14	56
2010	311	300	212	33	100	38

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Natuna

Berdasarkan tabel 3.2 terlihat bahwa tidak semua tanaman yang ditanam pada tahun 2011 dipanen pada tahun yang sama atau ada juga tanaman yang gagal panen. Sehingga luas panen tanaman pangan lebih kecil dari luas tanamnya. Hal ini terjadi pada komoditas padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar maupun kacang tanah. Jumlah luas panen yang cukup banyak selisihnya dibandingkan dengan luas tanam sebaiknya bisa menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah.

PERTANIAN

Tabel 3.3 Jumlah Produksi Bahan Makanan menurut Komoditas dan Kecamatan Tahun 2011 (Ha)

Kecamatan	Padi	Jagung	UbiKayu	UbiJalar	Talas	Kacang Tanah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Midai	-	7	120	16	12	3
2. Bunguran Barat	120	22	60	7	-	3
3. Bunguran Utara	30	2	90	2	-	-
4. PulauLaut	-	-	-	-	-	-
5. PulauTiga	-	-	-	-	-	-
6. BunguranTimur	32	4	50	-	-	-
7. BunguranTimur Laut	-	9	60	4	-	-
8. Bunguran Tengah	33	39	170	8	1	8
9. Bunguran Selatan	-	7	30	2	1	1
10. Serasan	-	33	390	19	-	9
11. Subi	-	2	10	-	-	-
12. SerasanTimur	14	61	550	29	-	15
2011	229	186	1.530	87	14	39
2010	912,4	333,9	1.156	1.374	100	164

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Natuna

Berdasarkan jumlah produksinya masing-masing komoditas yang luas tanamnya mengalami penurunan juga menunjukkan penurunan produksi dibandingkan tahun sebelumnya. Seperti komoditas padi tahun 2010 menghasilkan 912,4 ton namun di tahun 2011 hanya menghasilkan 229 ton.

Berdasarkan tabel 3.3, produksi padi paling besar di Kecamatan Bunguran Barat yaitu sebesar 120 ton. Kecamatan Serasan Timur menjadi sentra produksi sebagian besar komoditas tanaman pangan diantaranya jagung, ubi kayu, ubi

PERTANIAN

jalar dan kacang tanah dengan jumlah produksi masing-masing 61 ton, 550 ton, 29 ton dan 15 ton.

Salah satu penyebab tidak stabilnya luas tanam padi di kabupaten Natuna adalah karena ada beberapa petani di Kabupaten Natuna yang sangat bergantung pada adanya bantuan dari pemerintah untuk menanam padi. Baik berupa benih padi unggul maupun pupuk yang akan digunakan, karena jika mencari bibit atau pupuk sendiri selain harganya yang cukup mahal karena faktor transportasi, benih dan pupuk tersebut juga sulit didapatkan di Kabupaten Natuna. Faktor musim juga menjadi penentu untuk menanam padi atau tidak, sebab sebagian besar sawah yang ada di Kabupaten Natuna adalah sawah tadah hujan.

3.2 Sub Sektor Perkebunan

Sebagai daerah yang didominasi oleh lautan dan daerah pantai maka komoditas utama perkebunan Kabupaten Natuna adalah kelapa, selain itu terdapat juga tanaman perkebunan yang cukup banyak diusahakan yaitu karet dan cengkeh. Petani juga mengusahakan tanaman kopi, lada dan kelapa sawit. Namun untuk komoditi kelapa sawit hingga tahun 2011 belum berproduksi.

PERTANIAN

Tabel 3.4 Luas Lahan Perkebunan menurut Komoditas dan Kecamatan Tahun 2011 (Ha)

Kecamatan	Karet	Kelapa	Kelapa Sawit	Kopi	Cengkeh	Lada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Midai	105	2.595	-	-	893	14
2. Bunguran Barat	220	925	700	8	790	70
3. Bunguran Utara	165	1.990	-	6	690	11
4. PulauLaut	100	1.100	-	-	350	-
5. PulauTiga	8	320	-	-	903	-
6. BunguranTimur	980	1.390	-	6	1.075	23
7. BunguranTimur Laut	558	3.145	-	14	1.590	14
8. Bunguran Tengah	1.237	40,5	-	-	-	-
9. Bunguran Selatan	620	1.050	-	8	1.375	-
10. Serasan	115,5	286	-	2,5	2.815	10,5
11. Subi	16	588	-	-	907	-
12. SerasanTimur	163,0	576	-	-	801	-
2011	4.287,5	14.005,5	700	44,5	12.189	142,5

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Natuna

Dilihat dari tabel 3.4 terlihat bahwa ada tiga jenis komoditas tanaman perkebunan yang mendominasi di Kabupaten Natuna yaitu Kelapa yang memiliki luas lahan tersebar yaitu 14.005,5 Ha disusul oleh cengkeh seluas 12.189 Ha dan karet seluas 4.287,5 Ha. Luas lahan terluas untuk komoditas karet terdapat di Kecamatan Bunguran Tengah, kelapa terdapat di Kecamatan Bunguran Timur sedangkan cengkeh terluas ada di Kecamatan Serasan. Tiga komoditas tanaman perkebunan lainnya hanya memiliki luas lahan yang sedikit yaitu kelapa sawit, kopi dan lada.

PERTANIAN

Tabel 3.5 Jumlah Produksi Perkebunan menurut Komoditas dan Kecamatan Tahun 2011 (Ton)

Kecamatan	Karet	Kelapa	Kelapa Sawit	Kopi	Cengkeh	Lada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Midai	30	950	-	-	900	1
2. Bunguran Barat	350	800	-	0,3	200	0,3
3. Bunguran Utara	189	850	-	1	135	0,3
4. PulauLaut	5.5	350	-	-	30	-
5. PulauTiga	10	63	-	-	145	-
6. BunguranTimur	1.000	600	-	0,1	50	2
7. BunguranTimur Laut	750	900	-	0,5	80	0,6
8. Bunguran Tengah	1.670	4,2	-	-	-	-
9. Bunguran Selatan	125	450	-	0,3	900	-
10. Serasan	240	300	-	0,4	250	1
11. Subi	10	445	-	-	135	-
12. SerasanTimur	24	300	-	-	56	-
2011	4.403,5	6.012,2	-	2,6	2.881	5,2

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Natuna

Pada tabel 3.5 terlihat bahwa produksi karet terbesar ada di Kecamatan Bunguran Tengah yang mencapai 1.670 ton, produksi kelapa terbesar ada di Kecamatan Midai yaitu sebanyak 950 ton sedangkan cengkeh ada di Kecamatan Bunguran Selatan dan Kecamatan Midai yang mencapai 900 ton. Dua komoditi lainnya yaitu kopi dan lada jumlah produksinya masing-masing sebanyak 2,6 ton dan 5,2 ton sedangkan kelapa sawit walaupun ada lahan yang ditanami tapi belum berproduksi.

3.3 Sub Sektor Peternakan

Pembangunan sub sektor peternakan bertujuan untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam usaha memperbaiki gizi masyarakat, di samping meningkatkan pendapatan peternakan sehingga diharapkan Kabupaten Natuna tidak perlu lagi mengimpor kebutuhan daging dan ternak dari daerah lain.

Tabel 3.6 Jumlah Ternak dan Unggas menurut Jenis dan Kecamatan Tahun 2011

Kecamatan	Sapi	Kerbau	Kambing	Ayam	Itik	Produksi Telur
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1. Midai	1.370	-	590	20.350	25	14.376
2. Bunguran Barat	605	-	387	10.000	560	9.088
3. Bunguran Utara	685	-	14	2.600	50	2.010
4. PulauLaut	521	-	-	600	45	587
5. PulauTiga	28	-	72	2.880	260	2.982
6. BunguranTimur	1.537	-	12	7.550	800	8.254
7. BunguranTimur Laut	703	-	3	6.500	100	4.931
8. Bunguran Tengah	1.162	-	22	6.010	700	6.811
9. Bunguran Selatan	1.028	-	16	8.450	50	6.117
10. Serasan	114	-	-	2.010	710	4.033
11. Subi	114	-	500	3.500	65	2.697
12. SerasanTimur	306	6	76	6.955	760	7.689
2011	8.173	6	1.692	77.415	4.125	69.576
2010	4.457	-	1.371	80.232	3.709	70.018

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Natuna

PERTANIAN

Tabel 3.6 menunjukkan bahwa hampir semua jumlah ternak dan unggas mengalami peningkatan pada tahun 2011 kecuali ayam. Jumlah sapi yang naik hingga 83,37 persen, kambing meningkat sebesar 23,41 dan ayam 11,21 persen. Sedangkan ayam mengalami penurunan 3,51 persen jika dibandingkan dengan tahun 2010. Kecamatan yang memiliki jumlah ternak sapi terbanyak adalah Kecamatan Bunguran Timur yaitu sebanyak 1.537 ekor sedangkan untuk ternak kambing di Kecamatan Midai yaitu sebanyak 590 ekor.

Hampir secara keseluruhan ternak dan unggas ini menyebar merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Natuna, ini menandakan sub sektor peternakan cukup berpotensi di Kabupaten Natuna di masa yang akan datang.

3.4 Sub Sektor Perikanan

Berdasarkan sistem usahanya sub sektor perikanan dibedakan menjadi dua yaitu perikanan tangkap (nelayan) dan perikanan budidaya, sedangkan berdasarkan lokasi usaha perikanan tangkap terbagi menjadi penangkapan di perairan laut dan perairan umum (sungai, danau) sementara perikanan budidaya terbagi menjadi budidaya di tambak, kolam dan karamba. Sub sektor perikanan yang mendominasi di Kabupaten Natuna adalah perikanan tangkap (nelayan) dan budidaya ikan di keramba.

PERTANIAN

Tabel 3.7 Jumlah RTP, Keramba dan Produksi Perikanan Budidaya menurut Kecamatan Tahun 2011

Kecamatan	Jumlah RTP	Jumlah Keramba	Produksi (Ton)	
			2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Midai	23	42	3,18	4,23
2. Bunguran Barat	286	809	43,77	81,55
3. Bunguran Utara	38	156	11,79	15,72
4. PulauLaut	28	142	10,74	15,51
5. PulauTiga	192	194	16,25	19,56
6. BunguranTimur	21	48	3,63	4,44
7. BunguranTimur Laut	6	31	2,34	3,65
8. Bunguran Tengah	0	0	0	0
9. Bunguran Selatan	5	23	1,74	2,90
10. Serasan	223	182	61,46	18,35
11. Subi	54	232	17,54	23,39
12. SerasanTimur ^{*)}	0	0	0	0
2010	876	1.859	172,44	189,30

catatan : *) data masih tercakup di Kecamatan Serasan

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna

Rumah tangga petani keramba tersebar hampir di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna. Jumlah rumah tangga petani keramba terbanyak ada di Kecamatan Bunguran Barat yaitu sebanyak 286 rumah tangga pertanian atau 32,65 persen, sehingga jumlah produksi yang terbesar berasal dari kecamatan yang sama yaitu sebesar 81,55 Ton.

Tabel 3.8 Jumlah RTP dan Produksi Perikanan Tangkap menurut Kecamatan Tahun 2011

Kecamatan	Jumlah RTP	Produksi (Ton)	
		2010	2011
(1)	(2)	(4)	(5)
1. Midai	324	1.379,36	1.448,16
2. Bunguran Barat	460	2.332,24	2.785,36
3. Bunguran Utara	243	7.846,96	986,48
4. PulauLaut	256	1.657,72	2.015,96
5. PulauTiga	606	5.464,10	4.227,08
6. BunguranTimur	384	3.636,92	3.841,08
7. BunguranTimur Laut	123	1.791,56	2.095,40
8. Bunguran Tengah	55	278	306
9. Bunguran Selatan	142	1.096,56	1.275,92
10. Serasan	839	10.001,76	12.465,62
11. Subi	341	6.634,2	8.666,88
12. SerasanTimur ⁾	0	0	0
2010	3.773	42.119,38	40.113,94

catatan : *) data masih tercakup di Kecamatan Serasan

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna

Jumlah rumah tangga petani perikanan tangkap pada tahun 2011 sebanyak 3.773 RTP yang tersebar di seluruh kecamatan dan terbanyak berada di kecamatan Serasan dan Serasan Timur (22,24 persen atau 839 RTP), begitu juga jumlah produksi terbesar di kecamatan Serasan dan Serasan Timur yaitu 12.465,62 ton.

PERTANIAN

Secara Keseluruhan jumlah produksi perikanan tangkap turun sebesar 4,76 persen dibandingkan tahun 2011 dibanding tahun 2010 yaitu 42.119,38 ton sedangkan produksi di tahun 2011 sebesar 40.113,94 ton.

<http://natunakab.bps.go.id>

PARIWISATA



*Gambaran Umum Sektor Pariwisata
ditinjau dari sisi Perhotelan*

4

PARIWISATA

Peran sektor pariwisata makin penting dalam perekonomian, baik sebagai salah satu sumber penerimaan devisa maupun kesempatan kerja serta kesempatan berusaha. Kegiatan kepariwisataan diharapkan mampu menjadi salah satu kekuatan pembangunan yang dapat diandalkan, dengan pemasukan devisa yang cukup memadai. Sektor pariwisata ini juga diharapkan dapat memperluas dan meratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, khususnya masyarakat sekitarnya untuk merangsang pembangunan regional, memperkenalkan identitas dan kebudayaan bangsa.

Kabupaten Natuna dengan keindahan alamnya merupakan daerah yang cukup berpotensi dalam bidang pariwisata, namun sayang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memperkenalkan pariwisata di daerah ini kepada para wisatawan belum cukup memadai. Letak geografis yang cukup jauh juga merupakan salah satu faktor penyebab kurang berkembangnya sektor pariwisata di Kabupaten Natuna. Karena itu upaya untuk membenahi berbagai objek dan melengkapi fasilitas dengan

PARIWISATA

mengembangkan jaringan transportasi perlu terus ditingkatkan.

Industri pariwisata secara langsung terkait erat dengan objek wisata, perhotelan, agen perjalanan dan cinderamata, namun secara tidak langsung juga terkait erat dengan berbagai sektor perekonomian.

4.1 Perhotelan

Dalam perkembangannya, kegiatan pariwisata telah menjadi pendulang devisa di banyak daerah. Kabupaten Natuna memiliki potensi keindahan alam yang luar biasa, berupa panorama alam baik berupa pegunungan maupun pantainya. Salah satu penunjang utama dari kegiatan pariwisata adalah perhotelan.

Peranan sub sektor hotel dalam perekonomian Kabupaten Natuna sampai saat ini memang masih belum terlalu besar. Namun Kemajuan industri perhotelan dapat diikuti perkembangannya, melalui jumlah hotel dan akomodasi, jumlah kamar, dan jumlah kamar tidur. Selain dari faktor transportasi maka sektor perhotelan akan membantu meningkatkan sektor pariwisata. Semakin lengkap dan baik fasilitas perhotelan yang disediakan maka akan semakin memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang datang ke Kabupaten Natuna.

PARIWISATA

Tabel 4.1 Banyaknya Perusahaan Akomodasi/Hotel Non Bintang Menurut Kecamatan Tahun 2011

Kecamatan	Banyaknya Hotel	Banyak Kamar	Banyak Tempat Tidur	Jumlah Tenaga Kerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	pr	lk
	(5)				
1. Midai	1	11	21	1	2
2. Bunguran Barat	8	95	105	11	8
3. Bunguran Utara	2	14	21	2	3
4. PulauLaut	-	-	-	-	-
5. PulauTiga	1	8	16	1	
6. BunguranTimur	16	273	330	40	34
7. BunguranTimur Laut	-	-	-	-	
8. Bunguran Tengah	-	-	-	-	
9. Bunguran Selatan	-	-	-	-	
10.Serasan	3	23	24	3	4
11.Subi	3	27	27	4	8
12.SerasanTimur	-	-	-	-	
2011	34	451	544	62	59
2010	34	430	524	65	48

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna

Dalam tabel 4.1 diatas, terlihat bahwa tujuh kecamatan dari dua belas kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna memiliki penginapan/hotel non bintang, wilayah yang terpisah dengan ibukota kabupaten yang tidak memiliki penginapan/hotel non bintang adalah Kecamatan Pulau Laut dan Kecamatan Serasan Timur. Keberadaan hotel/ penginapan non bintang di hampir semua kecamatan ini sangat menunjang sektor pariwisata mengingat jarak tempuh dan

PARIWISATA

jadwal angkutan laut yang ada di Kabupaten Natuna memang memerlukan fasilitas penginapan jika berkunjung ke daerah tersebut.

Tabel 4.2 Jumlah Hotel, Kamar dan Tempat Tidur Hotel dan Akomodasi di Kabupaten Natuna Tahun 2007-2011

Tahun <i>Year</i>	Banyaknya Hotel <i>Hotel/Motel</i>	Kamar <i>Room</i>	Tempat Tidur <i>Bed</i>	Jumlah Tenaga Kerja <i>Employee</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2011	34	451	544	121
2010	34	430	524	113
2009	23	319	397	82
2008	23	325	412	77
2007	22	306	368	63

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna

Perkembangan hotel dan akomodasi yang ada di Kabupaten Natuna dapat dilihat pada Tabel 4.2. Dari tabel tersebut terlihat bahwa jumlah hotel pada tahun 2011 tidak mengalami penambahan jika dibandingkan dengan tahun 2010 tapi jika dilihat jumlah kamar ada sedikit penambahan yaitu sebesar 4,89 persen, hal ini juga berimbas pada jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor perhotelan yaitu terjadinya

PARIWISATA

peningkatan menjadi 121 tenaga kerja sedangkan tahun 2010 sebanyak 113 orang.

Seiring dengan peningkatan jumlah penginapan/hotel non bintang, tingkat penghunian kamar (TPK) tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 34,43 persen dibanding tahun 2010 hanya sebesar 75,19 persen itu menandakan bahwa selama tahun 2011 wisatawan yang datang ke Kabupaten Natuna baik itu wisatawan domestik maupun mancanegara 34,43 persen yang menginap di hotel/penginapan.

Namun wisatawan yang datang ke Kabupaten Natuna baik itu wisatawan domestik maupun mancanegara pada tahun 2011 sama dengan tahun 2010 secara rata-rata lama wisatawan-wisatawan tersebut menginap tidak lebih 1 (satu) hari.

Banyak hal yang menyebabkan ini terjadi, salah satunya adalah kurang tersedianya sarana dan prasarana yang disediakan di hotel/penginapan yang tersebar di wilayah Kabupaten Natuna untuk kenyamanan pelanggan serta tidak adanya sarana penunjang wisatawan untuk menikmati keindahan tempat-tempat wisata di kabupaten ini. Oleh karena itu, diharapkan di masa yang akan datang dapat disediakan sarana dan prasarana yang memadai dan adanya sarana penunjang menuju tempat-tempat wisata di Kabupaten Natuna agar wisatawan yang datang semakin banyak.

KETENAGAKERJAAN



*Gambaran Umum Kondisi Ketenagakerjaan
Kabupaten Natuna Tahun 2011*

5

KETENAGAKERJAAN

Dalam *grand strategy* yang menjadi rumusan pembangunan pemerintahan Indonesia dewasa ini, masalah ketenagakerjaan menjadi salah satu prioritas penting dalam pembangunan karena ketenagakerjaan merupakan modal penting dalam menggerakkan roda pembangunan suatu negara. Namun demikian permasalahan ketenagakerjaan Indonesia terus bergulir menjadi semakin besar dan kompleks. Besar karena jumlah angkatan kerja yang besar dan cenderung terus meningkat sejalan dengan transisi demografi yang menyebabkan komposisi penduduk usia produktif lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk secara keseluruhan. Kompleks, karena keterkaitan yang erat dengan faktor eksternal dan internal.

Bab ini berusaha untuk menggambarkan keadaan ketenagakerjaan di Kabupaten Natuna terutama pada tahun 2011. Beberapa indikator yang akan digambarkan antara lain TPAK, TPT, dan indikator ketenagakerjaan yang lain.

Menurut UU No. 20 tahun 1999, penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang terdiri dari

KETENAGAKERJAAN

Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Yang termasuk Angkatan Kerja adalah penduduk dalam usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, dan orang tidak bekerja yang mencari pekerjaan. Sedangkan Bukan angkatan kerja, adalah penduduk dalam usia kerja (15 tahun keatas) yang tidak bekerja, tidak mencari pekerjaan, tetapi kegiatan golongan ini masih bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya (seperti tidak mampu bekerja, pensiun).

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan upaya menyeluruh dan ditujukan pada peningkatan, pembentukan dan pengembangan tenaga kerja yang berkualitas, produktif, efisien, efektif dan berjiwa wiraswasta sehingga mampu mengisi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tenaga kerja disebut penduduk usia kerja atau lebih populer digunakan ILO (*International Labour Organization*) sebagai Angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri atas penduduk yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Sehingga indikator ketenagakerjaan dapat diukur salah satunya dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK).

KETENAGAKERJAAN

Secara populer penduduk usia kerja disebut tenaga kerja merupakan salah satu indikator dasar dalam ketenagakerjaan mengacu kepada LFA (Labour Force Approach) yang digunakan ILO (International Labour Organization). Angkatan kerja terdiri atas penduduk yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan.

Data hasil Susenas tahun 2011 dalam tabel 5.1 menunjukkan bahwa TPAK laki-laki 83,33 persen sedangkan TPAK perempuan hanya 46,52 persen. Hal ini dikarenakan perempuan pada umumnya menyanggah peran ganda, yaitu selain aktif dalam kegiatan perekonomian mereka juga dituntut untuk berperan di dalam mengurus rumah tangga seperti mengasuh anak-anak, dll.

Selain itu, TPAK pada umumnya lebih tinggi di daerah perkotaan 69,38 persen dibandingkan di daerah pedesaan hanya 61,58 persen. Hal ini disebabkan di daerah perkotaan memiliki aktivitas ekonomi yang lebih beragam dan dinamis sehingga banyak lapangan pekerjaan yang tercipta dan banyak juga yang mencari pekerjaan di kawasan perkotaan.

Tabel 5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin Tahun 2011

Daerah Tempat Tinggal	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan + Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	55,21	84,16	69,38
Pedesaan	39,21	82,70	61,58
Perkotaan+Pedesaan	46,52	83,338	65,05

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Natuna

Secara umum, TPAK Kabupaten Natuna Tahun 2011 mencapai 65,05 persen artinya penduduk usia 15 tahun keatas sebanyak 65,05 persen yang bekerja dan sedang mencari kerja jika dibandingkan secara total penduduk usia 15 tahun ke atas.

5.2 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

Indikator ini mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang bekerja atau sementara tidak bekerja di suatu negara atau wilayah. Terlihat dalam tabel 5.2 bahwa kesempatan kerja di Kabupaten Natuna masih sangat besar yaitu sebesar 96,40 persen. Hal ini sangatlah wajar dikarenakan sebagai Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten muda yang sedang membangun dalam mengembangkan sumber daya alam dan potensi-potensi lain yang ada di kabupaten ini. Jika dilihat dari daerah tempat tinggal maka

KETENAGAKERJAAN

kesempatan bekerja di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan, hal ini mungkin disebabkan di daerah pedesaan tidak terlalu banyak kualifikasi yang harus dipenuhi pencari kerja karena kesempatan kerja berasal dari sektor pertanian.

Sementara itu, jika menurut jenis kelamin tingkat kesempatan kerja laki-laki sebesar 97,79 persen dan tingkat kesempatan kerja perempuan sebesar 93,88 persen.

Tabel 5.2 Tingkat Kesempatan Kerja Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin Tahun 2011

Daerah Tempat Tinggal	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan + Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	92,03	96,33	94,58
Pedesaan	96,06	98,93	98,04
Perkotaan+Pedesaan	93,88	93,88	96,40

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Natuna

5.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka dapat dihitung dengan membuat perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja. Tabel 5.3 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Natuna pada tahun 2011 mencapai 3,60 persen. Persentase pengangguran terbuka

untuk penduduk yang bertempat tinggal di daerah perkotaan mencapai 5,42 persen sedangkan untuk penduduk yang bertempat tinggal di daerah pedesaan hanya mencapai 1,96 persen.

Tabel 5.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin Tahun 2011

Daerah Tempat Tinggal	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan + Laki-laki
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	7,97	3,67	5,42
Pedesaan	3,94	1,07	1,96
Perkotaan+Pedesaan	6,12	2,21	3,60

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Natuna

5.4 Tingkat Setengah Pengangguran

Dari penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja, ternyata masih terdapat penduduk setengah pengangguran yaitu orang yang bekerja kurang dari 35 jam/ minggu. Semakin tinggi tingkat setengah penganggur memberi indikasi pemanfaatan sumber daya manusia semakin rendah, atau sebaliknya. Pada tahun 2011, tingkat setengah pengangguran di Kabupaten Natuna mencapai 29,55 persen dari total penduduk yang bekerja, angka ini menurun jika dibandingkan

KETENAGAKERJAAN

tahun 2010 artinya terdapat indikasi pemanfaatan sumber daya manusia semakin tinggi jika dibandingkan tahun 2010.

Penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu banyak didominasi oleh perempuan yaitu sebesar 41,96 persen, lebih tinggi jika dibandingkan penduduk laki-laki. Hal ini disebabkan karena wanita juga mempunyai peran ganda selain aktif dalam kegiatan perekonomian mereka juga dituntut untuk berperan mengurus rumah tangga. Sementara itu, penduduk yang bekerja 35 jam/ minggu atau lebih berkisar 70,45 persen diantara mempunyai jam kerja seluruhnya 35 jam atau lebih (jam kerja normal / lebih).

5.5 Lapangan Usaha

Sektor pertanian dan sektor jasa masih menjadi tumpuan sebagian besar penduduk Kabupaten Natuna terhadap peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk yang masing-masing mencapai 28,51 persen dan 34,13. Sementara itu sektor perdagangan, rumah makan dan akomodasi sebesar 13,87 persen, sektor konstruksi sebesar 11,83 persen, sektor industri sebesar 6,25 persen, sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi sebesar 3,21 persen.

Sementara itu, sektor-sektor terendah yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor keuangan dan

KETENAGAKERJAAN

persewaan serta sektor listrik, air, dan gas masing-masing sebesar 1,65 persen, 0,37 persen dan 0,17 persen.

Tabel 5.4 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012

Lapangan Usaha	Persen
(1)	(2)
Pertanian	28,51
Pertambangan dan Penggalian	1,65
Industri	6,25
Listrik, Gas dan Air	0,37
Konstruksi	11,83
Perdagangan, Rumah Makan dan Akomodasi	13,87
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	3,21
Keuangan dan Persewaan	0,17
Jasa dan Lainnya	34,13
Jumlah	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Natuna

5.6 Status Pekerjaan

Dari hasil Susenas 2011 dapat diketahui bahwa penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja terbesar adalah yang berstatus buruh/karyawan/pegawai yaitu sekitar 40,15 persen, dan yang terendah adalah yang berstatus pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga sekitar 4,74 persen. Selain dari itu adalah yang berstatus berusaha sendiri sekitar 34,95 persen, berstatus pekerja bebas sekitar 8,76 persen, berstatus

KETENAGAKERJAAN

berusaha dibantu buruh tetap/dibayar sekitar 6,50 persen, berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar sebesar 4,90 persen.

Tabel 5.5 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin Tahun 2011

Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin (%)		Perempuan + Laki-laki (%)
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha Sendiri	34,96	34,93	34,95
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap	5,39	3,88	4,90
Berusaha Dibantu Buruh Tetap	7,91	3,54	6,50
Buruh/ Karyawan/ Pegawai	39,53	41,43	40,15
Pekerja Bebas	10,63	4,84	8,76
Pekerja Keluarga/Tak Dibayar	1,58	11,39	4,74
TOTAL	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Natuna

PERDAGANGAN



Gambaran Umum Perdagangan Barang-barang Pokok Kabupaten Natuna Tahun 2011

6

PERDAGANGAN

Salah satu unit kegiatan ekonomi diluar sektor pertanian yang cukup menyokong perekonomian di Kabupaten Natuna adalah sektor perdagangan. Secara tidak langsung sektor ini menghasilkan satu dari beberapa indikator yang dapat mengukur kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang berpendapatan tetap adalah perubahan harga yang biasanya dinyatakan dengan indeks.

Besarnya perubahan harga kebutuhan masyarakat dan pemerintah dapat diukur dari perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau biasa juga disebut inflasi/deflasi pada daerah pengamatan. Indeks Harga Konsumen dapat mengukur secara agregat dari waktu ke waktu perubahan pengeluaran/biaya dari paket komoditas yang tetap (*Fixed basket*) barang dan jasa yang biasa dibeli oleh mayoritas rumah tangga. Dengan kuantitas dan kualitas dari *basket* yang dianggap konstan pada tahun dasar, indeks tersebut semata-mata mencerminkan perubahan harga dan didesain sebagai suatu ukuran dari dampak perubahan harga pada pembelian

barang konsumsi dan jasa diantara rumahtangga-rumahtangga dimasing-masing kota pengamatan.

6.1 Perkembangan Harga Bahan-Bahan Pokok Kabupaten Natuna

Harga merupakan salah satu indikator untuk mengetahui perkembangan ekonomi suatu daerah. Data harga-harga sangat bermanfaat untuk melihat kestabilan atau gejolak harga komoditi-komoditi di suatu daerah. Besarnya perubahan harga suatu komoditi menggambarkan tentang besarnya perubahan yang terjadi di pasar.

Harga-harga bahan pokok perlu disajikan di wilayah Kabupaten Natuna, karena dengan tersedianya data harga bahan-bahan pokok ini secara ringkas dapat memberi gambaran/masukan yang penting bagi para pengambil kebijaksanaan di daerah untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan dan stok komoditi yang ada khususnya komoditi bahan-bahan pokok.

Harga dan stok komoditi barang yang ada di Kabupaten Natuna sangat bergantung dengan baik buruknya cuaca dan sarana transportasi pengangkut bahan-bahan pokok tersebut keluar atau masuk Kabupaten Natuna. Jika cuaca baik maka kondisi stok dan harga pasar akan stabil sebaliknya jika cuaca buruk maka akan menyebabkan kelangkaan yang berdampak langsung pada harga.

PERDAGANGAN

Dalam tabel 6.1, secara umum pada tahun 2011 harga-harga bahan-bahan pokok mengalami kenaikan yang berarti bila dibandingkan dengan keadaan harga tahun 2010. Dari bahan-bahan pokok yang tercatat, sebagian besar mengalami kenaikan harga kecuali ketela pohon, jagung, telur ayam, susu dan cabe hijau.

Tabel 6.1 Harga Bahan-Bahan Pokok di Kabupaten Natuna Tahun 2009-2011

Barang-Barang Pokok	Satuan	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Beras Kualitas Rendah	Kg	7.000	9.000	9.000
Beras Kualitas Sedang	Kg	10.000	12.000	13.000
Ketela Pohon	Kg	6.000	6.500	4.000
Jagung	Kg	5.000	7.000	5.000
Mie Instant	Bungkus	1.150	1.350	1.700
Minyak Goreng	Liter	9.500	12.000	15.500
Daging Sapi	Kg	63.000	65.000	65.000
Daging Ayam	1 Ekor	34.000	40.000	43.000
Telur Ayam	Kg	19.000	18.000	18.000
Susu	400 Gr	38.000	40.000	40.000
Sagu	Kg	6.000	6.000	5.500
Garam	200 Gr	750	1.000	1.300
Bawang Merah	Kg	14.200	15.800	17.750
Bawang Putih	Kg	13.000	17.500	19.500
Cabe Merah	Kg	45.000	60.000	64.600
Cabe Hijau	Kg	30.000	45.000	44.000
Cabe Rawit	Kg	40.000	50.000	64.000
Minyak Tanah	Liter	3.350	3.500	4.500

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna

PERDAGANGAN

Komoditi yang mengalami peningkatan harga antara lain beras kualitas sedang yang mengalami kenaikan sebesar 8,33 persen, mie instant sebesar 25,93 persen, minyak goreng sebesar 29,17 persen, daging ayam sebesar 7,50 persen, garam sebesar 30,00 persen, bawang merah sebesar 12,34 persen, bawang putih sebesar 11,43 persen, cabe merah sebesar 7,67 persen, cabe rawit sebesar 28,00 persen dan minyak tanah sebesar 28,57 persen.

Sebaliknya komoditi yang mengalami penurunan harga antara lain ketela pohon sebesar 38,46 persen, jagung 28,57 persen, sago 8,33 persen dan cabe hijau 2,22 persen. Sementara itu beras kualitas rendah, daging sapi telur ayam, serta susu tidak mengalami perubahan harga.

ANALISIS PDRB



Analisis Produk Domestik Regional Bruto

Kabupaten Natuna Tahun 2011

7

ANALISIS PDRB

Hasil pembangunan ekonomi yang telah dicapai di masa lalu perlu ditelaah dan dinilai manfaat serta implikasinya untuk pembangunan masa kini dan masa datang. Terlebih lagi dengan semakin pesat dan meluasnya kegiatan pembangunan yang dilakukan di era otonomi daerah. Salah satu indikator yang dapat mengukur perkembangan kuantitatif dan kemajuan perkembangan ekonomi Kabupaten Natuna serta sejauh mana kinerja pembangunan yang telah dicapai beberapa tahun terakhir akan disajikan pada bab ini, seperti laju pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi.

7.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pola dan proses dinamika pembangunan ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh aktivitas sektor-sektor ekonomi secara menyeluruh dan terpadu. Aktivitas sektor-sektor ekonomi yang digambarkan dengan proses siklus transaksi dari produsen kepada konsumen dan sebaliknya, akan berujung pada arus barang dan jasa seiring dengan adanya

ANALISIS PDRB

nilai tambah yang tercipta. PDRB sektoral menggambarkan jumlah seluruh nilai tambah bruto dari subsektor/sektor di suatu wilayah.

Pertumbuhan ekonomi diukur dari kenaikan pendapatan nasional yang tercermin pada nilai PDRB dari tahun ke tahun. Indikator yang lazim digunakan untuk memperoleh tingkat pertumbuhan ekonomi riil adalah menggunakan PDRB atas dasar harga konstan yang menjadi petunjuk dari kinerja perekonomian secara umum sebagai ukuran kemajuan suatu daerah. Secara umum laju pertumbuhan ekonomi baik agregat maupun sektoral dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan, bukan atas dasar harga berlaku. PDRB atas dasar harga berlaku belum menggambarkan kenaikan atau pertumbuhan yang riil, karena masih dipengaruhi kenaikan tingkat harga atau inflasi.

Tabel 7.1 menggambarkan nilai tambah Kabupaten Natuna menurut 3 sektor yaitu primer, sekunder dan tersier dalam kurun waktu 5 tahun terakhir atas dasar harga konstan. Pada tahun 2011 terlihat bahwa kinerja sektor primer secara nilai memang paling besar dibandingkan kelompok sektor lainnya yaitu Rp 288,993 milyar. Sub sektor pertanian masih menjadi sektor primer yang mendominasi dengan nilai yang mencapai Rp 286,731 milyar. Selanjutnya di sektor sekunder sub sektor bangunan pada tahun 2011 memperoleh nilai

ANALISIS PDRB

tertinggi jika dibandingkan dengan dua sub sektor lainnya yaitu mencapai Rp 24,752 milyar. Sedangkan di sektor tersier sub sektor perdagangan, hotel dan restoran memiliki nilai tertinggi yaitu sebesar Rp 66, 812 milyar. Secara keseluruhan pada tahun 2011 semua sektor mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2010.

Tabel 7.1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Natuna Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2007-2011 (000 Rp)

Lapangan Usaha	2007	2008	2009	2010 [*]	2011 ^{**}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Primer	439.963	251.043	263.427	275.898	288.993
1. Pertanian	437.542	249.317	261.532	273.828	286.731
2. Pertambangan dan Penggalian	2.421	1.726	1.895	2.070	2.262
Sekunder	36.089	29.15	33.101	37.123	41.967
3. Industri	18.489	14.338	15.098	15.912	16.790
4. Listrik, Gas & Air	537	384	398	411	425
5. Bangunan	17.063	14.428	17.605	20.798	24.752
Tersier	176.612	101.12	109.119	117.997	127.696
6. Perdagangan, Hotel & Restoran.	94.951	51.137	55.797	61.043	66.812
7. Pengangkutan dan Komunikasi	25.771	14.919	16.376	17.970	19.731
8. Keuangan, Persewaan & Jasa	19.002	10.044	10.566	11.160	11.802
9. Jasa-jasa	36.888	25.02	26.38	27.823	29.351
Total	652.664	381.313	405.647	431.019	458.661

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna

ANALISIS PDRB

**Tabel 7.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2007 - 2011**

Lapangan Usaha	2007	2008	2009	2010 ^{*)}	2011 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	5,11	5,12	4,90	4,70	4,71
2. Pertambangan & Pengalihan	12,05	9,72	9,79	9,23	9,28
3. Industri	4,98	5,25	4,50	5,39	5,52
4. Listrik, Gas dan Air	3,52	3,68	3,55	3,53	3,27
5. Bangunan	16,69	20,79	22,02	18,14	19,01
6. Perdagangan, Hotel&Restoran	7,18	7,4	9,11	9,40	9,45
7. Pengangkutan & Komunikasi	9,08	9,19	9,77	9,74	9,80
8. Keuangan & Jasa Perusahaan	4,95	4,99	5,19	5,63	5,75
9. Jasa-jasa	8,54	5,23	5,43	5,47	5,49
PDRB	6,04	6,05	6,38	6,25	6,41

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna

Laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan merupakan rata-rata tertimbang dari pertumbuhan sektoralnya. Artinya apabila sebuah sektor mempunyai kontribusi besar dan ternyata pertumbuhannya lambat maka hal ini dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya apabila sektor yang mempunyai kontribusi besar mempunyai pertumbuhan yang tinggi maka

sektor tersebut dapat mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi menjadi tinggi.

Seperti digambarkan tabel 7.2, laju pertumbuhan Kabupaten Natuna tahun 2010 berada pada level 6,25 persen sedangkan tahun 2011 mengalami sedikit percepatan yaitu berada pada level 6,41 persen yaitu dari Rp. 431,01 milyar tahun 2010 menjadi Rp. 458,66 milyar pada tahun 2011. Hal ini disebabkan adanya peningkatan sebagian besar sektor dalam perekonomian. Sektor-sektor yang mengalami peningkatan tersebut antara lain pertanian, pertambangan dan penggalian, industri, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa.

6.2 Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya peranan sektor-sektor ekonomi dalam menciptakan nilai tambah. Hal tersebut juga menunjukkan ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan produksi dari setiap sektor ekonominya. Makin besar nilai tambah yang dapat diraih oleh suatu sektor maka semakin besarlah peranannya dalam perekonomian daerah tersebut.

ANALISIS PDRB

Tabel 7.3 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Natuna Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2007–2011 (000 Rp)

Lapangan Usaha	2007	2008	2009	2010 [*]	2011 ^{**}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Primer	991.51	572.984	610.817	658.504	712.980
1. Pertanian	986.248	569.202	606.594	653.761	707.630
2. Pertambangan dan Penggalian	5.262	3.782	4.223	4.743	5.350
Sekunder	73.147	60.869	72.812	86.396	102.683
3. Industri Pengolahan	25.911	20.291	21.406	23.335	25.694
4. Listrik, Gas & Air	1.189	857	942	1.035	1.120
5. Bangunan	46.047	39.72	50.463	62.026	75.869
Tersier	428.952	260.881	294.19	332.052	375.474
6. Perdagangan, Hotel & Rest.	227.21	135.998	157.749	182.115	209.767
7. Pengangkutan dan Komunikasi	58.925	36.666	41.197	46.209	52.422
8. Keuangan, Persewaan & Jasa	45.542	25.757	28.212	31.232	34.084
9. Jasa-jasa	97.274	62.46	66.955	72.496	79.201
Total	1.493.608	894.734	977.745	1.076.955	1.191.141

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna

Kontribusi terbesar dalam penciptaan nilai tambah pada perekonomian Kabupaten Natuna selama kurun waktu lima tahun terakhir selalu disumbangkan oleh sektor pertanian. Seperti tabel 7.3 diatas dapat dilihat bahwa kontribusi sektor pertanian rata-rata 60 persen tiap tahunnya tetapi memiliki kecenderungan mengalami penurunan. Hal ini

ANALISIS PDRB

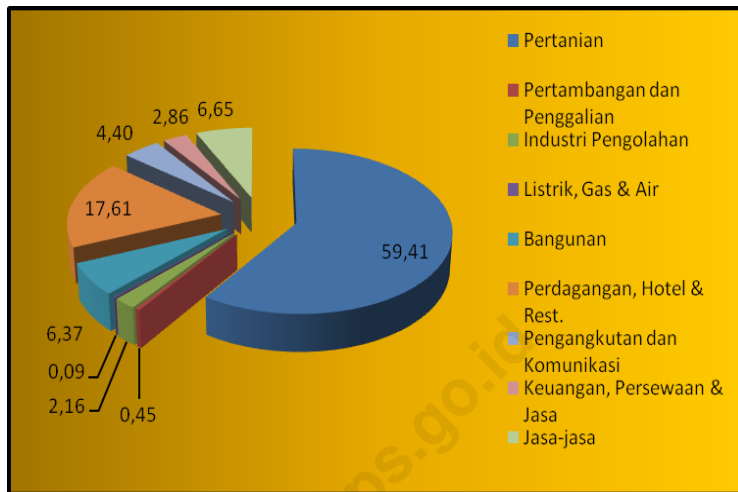
menandakan bahwa setiap tahunnya sektor-sektor selain pertanian meningkatkan peranannya dalam menjalankan perekonomian Kabupaten Natuna. Pada tahun 2011 sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar Rp 707,630 milyar (59,41 persen) secara persentase terlihat turun dari tahun sebelumnya yang bernilai Rp 653.761 milyar (60,70 persen).

Peranan terbesar kedua adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Selama lima tahun terakhir, peranan sektor ini cenderung meningkat. Pada tahun 2010 sebesar Rp 182,115 milyar (16,90 persen) meningkat menjadi Rp 209,767 milyar (17,61 persen) pada tahun 2011. Hal ini terjadi karena meningkatnya usaha perdagangan eceran dan bertambahnya usaha hotel dan restoran.

Sektor penyumbang terbesar ketiga adalah sektor jasa-jasa. Sektor ini memberikan kontribusi terhadap penciptaan nilai tambah pada perekonomian Kabupaten Natuna tahun 2011 sebesar Rp 72,201 milyar (6,65 persen) nilai ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 72.496 milyar. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya secara persentase pada tahun 2011 sektor jasa-jasa sedikit mengalami penurunan kontribusi dari 6,73 persen menjadi 6,65 persen pada tahun 2011.

Untuk lebih jelasnya, besaran peranan masing-masing sektor terhadap penciptaan nilai tambah perekonomian Kabupaten Natuna tahun 2010 dapat dilihat pada grafik 7.1.

Grafik 7.1 Distribusi PDRB Kabupaten Natuna Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 (Persen)



PENGELUARAN KONSUMSI DAN PENDAPATAN REGIONAL



Analisis Pengeluaran Konsumsi dan Pendapatan Regional Perkapita Kabupaten Natuna tahun 2011

8

*Pengeluaran Konsumsi
dan Pendapatan Regional*

Pembangunan adalah suatu proses yang dinamis dalam rangka mencapai masyarakat yang sejahtera. Selama ini pengukuran kinerja pembangunan sering kali menggunakan ukuran laju pertumbuhan ekonomi yang merupakan terjemahan dari laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)-nya.

Dengan kata lain adanya anggapan bahwa keberhasilan pembangunan daerah diukur dan diorientasikan hanya pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Meskipun menjadi ukuran yang diutamakan dalam indikator keberhasilan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata sering kali menyebabkan bertambah lebarnya ketimpangan antar golongan masyarakat (kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah) dan kesenjangan atau ketimpangan antar daerah. Ketimpangan yang semakin tinggi antar

golongan ini bisa memicu timbulnya masalah sosial, bahkan kerawanan disintegrasi kerukunan dalam masyarakat.

8.1 Pengeluaran Rata-rata Konsumsi

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan jelas dari besarnya pendapatan yang diterima. Namun mengingat data pendapatan yang akurat sulit diperoleh maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsumsi atau pengeluaran rumahtangga. Indikator pengeluaran per kapita secara empiris dapat digunakan sebagai indikator kesejahteraan.

Tujuan utama pengumpulan data ini adalah untuk melihat perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk, dan sebagai bahan analisis silang.

Seperti dalam tabel 8.1, rata-rata konsumsi per kapita masyarakat Kabupaten Natuna untuk kelompok makanan pada tahun 2011 sebesar Rp 458.495,- per bulan. Nilai konsumsi yang mendominasi kelompok makanan ini adalah konsumsi makanan dan minuman jadi yaitu sebesar Rp 78.627,- (17,15 persen), selanjutnya konsumsi padi-padian sebesar Rp 64.172,- (14,00 persen), serta konsumsi tembakau dan sirih sebesar Rp 61.654,- (13,45 persen), selain itu konsumsi ikan cukup mendominasi hingga mencapai Rp 56.125,- (12,24 persen).

PENGELUARAN KONSUMSI DAN PENDAPATAN REGIONAL

Tabel 8.1 Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Natuna Tahun 2009-2011

Kelompok Makanan	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
Padi-padian	47.014	55.608	64.172
Umbi-Umbian	5.240	2.926	4.122
Ikan	39.873	44.477	56.125
Daging	4.798	6.762	10.095
Telur dan Susu	26.920	30.030	36.792
Sayur-sayuran	22.348	18.207	36.628
Kacang-kacangan	8.050	5.983	6.331
Buah-buahan	52.406	17.862	22.561
Bahan Minuman	23.668	20.557	19.820
Minyak dan Lemak	15.107	12.373	28.192
Bumbu-bumbuan	12.258	10.205	13.683
Konsumsi Lainnya	14.277	18.539	19.693
Makanan dan Minuman Jadi	31.810	48.623	78.627
Tembakau dan Sirih	48.785	47.016	61.654
Jumlah	352.553	339.166	458.495

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Natuna

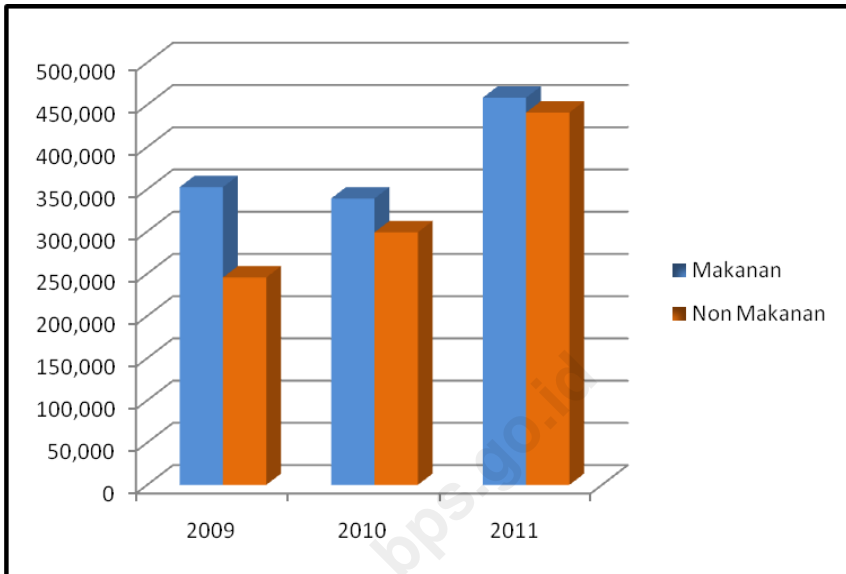
Tabel 8.2 Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Non Makanan di Kabupaten Natuna Tahun 2009-2011

Kelompok Non Makanan	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
Perumahan dan fasilitasnya	116.697	155.095	185.729
Barang dan Jasa	60.717	72.766	115.706
Biaya Pendidikan	16.775	13.038	14.741
Biaya Kesehatan	7.309	7.864	16.078
Pakaian, Alas kaki, Tutup Kepala	17.240	18.804	25.280
Barang yang Tahan Lama	16.087	21.737	46.621
Pajak dan Asuransi	6.692	4.902	16.461
Keperluan Pesta dan Upacara	4.042	4.830	20.275
Jumlah	245.561	299.035	440.864

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Natuna

Seperti dalam tabel 8.2 diatas, rata-rata konsumsi per kapita masyarakat Kabupaten Natuna untuk kelompok non makanan pada tahun 2011 sebesar Rp 440.864,- per bulan. Nilai konsumsi rata-rata kelompok non makanan di dominasi untuk pengeluaran perumahan dan fasilitasnya Rp 185.729,- (42,13 persen), selanjutnya disusul dengan pengeluaran untuk barang dan jasa sebesar Rp 115.706,- (26,24 persen), serta pengeluaran untuk barang yang tahan lama sebesar Rp 46.621,- (10,57 persen).

Grafik 8.1 Persentase Rata-rata Pengeluaran Penduduk di Kabupaten Natuna Tahun 2009-2011



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Natuna

Total pengeluaran rata-rata per kapita penduduk Kabupaten Natuna pada tahun 2011 untuk kelompok makanan dan non makanan tercatat sebesar Rp 899.359,-. Nilai pengeluaran per kapita ini terlihat lebih tinggi jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 638.201,-.

Seperti digambarkan oleh grafik diatas bahwa secara total pengeluaran, proporsi pengeluaran untuk kelompok non makanan dari tahun 2009 hingga tahun 2011 meningkat. Hal ini menandakan bahwa setiap tahunnya terdapat pergeseran penggunaan dari pendapatan yang didapatkan oleh setiap

masyarakat Kabupaten Natuna, yaitu tahun 2009 hampir semua nilai pengeluaran hanya untuk konsumsi makanan namun sekarang proporsinya lebih berimbang dengan konsumsi non makanannya.

Hal ini sejalan dengan hukum ekonomi bahwa semakin tinggi pendapatan semakin tinggi pula porsi pengeluaran untuk barang non makanan. Dari data Susenas 2011 tercatat bahwa penduduk Kabupaten Natuna menghabiskan sekitar 50,98 persen dari pendapatannya untuk belanja makanan.

8.2 Pendapatan Regional per Kapita

Nilai PDRB perkapita merupakan gambaran nilai tambah bruto yang diciptakan oleh setiap penduduk di suatu daerah sebagai akibat adanya proses produksi dalam rangkaian kegiatan ekonomi. Sementara itu pendapatan regional perkapita memberikan gambaran mengenai pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai balas jasa keikutsertaannya dalam proses produksi.

Besaran ini diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Kedua indikator tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah. Dengan melihat pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk dapat dilihat

PENGELUARAN KONSUMSI DAN PENDAPATAN REGIONAL

peningkatan dalam pendistribusian PDRB per kapita maupun pendapatan regional per kapita.

Salah satu tujuan tingkat kemakmuran dalam pencapaian pembangunan nasional dan regional adalah meningkatkan pendapatan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat yang disertai dengan pengurangan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan dengan cara meningkatkan mutu pendidikan dan juga perbaikan derajat kesehatan, sehingga dapat tercapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. PDRB dan pendapatan regional perkapita menjadi salah satu tolak ukur dalam pencapaian tingkat kemakmuran rakyat tersebut.

Tabel 8.3 PDRB Perkapita Kabupaten Natuna Tahun 2007-2011

Tahun	PDRB Perkapita	
	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan
2007	14,738,591.25	6,440,335.18
2008	14,716,994.69	6,272,015.32
2009	15,775,684.61	6,545,017.65
2010*	15,607,371.01	6,246,384.46
2011**	16,424,783.62	6,324,520.72

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Natuna

PENGELUARAN KONSUMSI DAN PENDAPATAN REGIONAL

Dari tabel 8.3 diketahui bahwa PDRB perkapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 sebesar Rp. 16.424.783,62 meningkat sebesar 5,19 persen dari tahun 2010 sebesar Rp. 15.607.371,01. Hal ini merupakan suatu pencapaian yang cukup berarti yang diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat adanya aktivitas produksi. Walaupun PDRB perkapita harga berlaku cukup tinggi namun tidak berarti bahwa kemampuan daya beli masyarakat juga meningkat. Sebab angka tersebut masih dipengaruhi oleh unsur kenaikan harga barang dan jasa.

Apabila pengaruh perubahan harga dikeluarkan, maka penghitungan tersebut merupakan angka atas dasar harga konstan. Sehingga secara riil PDRB per kapita tahun 2011 sebesar Rp 6.324.520,72 meningkat sebesar 1,25 persen dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp 6.246.384,46.

Tabel 8.4 Pendapatan Perkapita Kabupaten Natuna Tahun 2007-2011

Tahun	PDRB Perkapita	
	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan
2007	13,903,180.43	6,075,284.97
2008	13,882,808.00	5,916,505.80
2009	14,874,216.91	6,171,016.64
2010*	14,715,521.24	5,889,448.21
2011**	15,486,224.55	5,963,119.54

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna

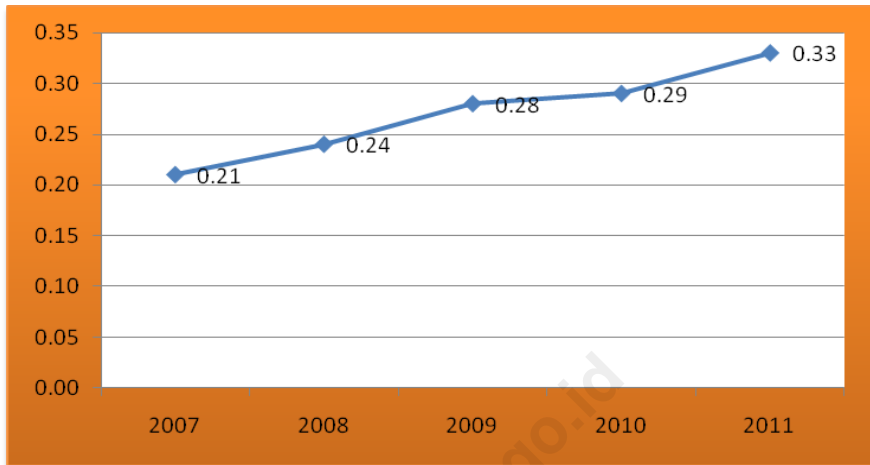
PENGELUARAN KONSUMSI DAN PENDAPATAN REGIONAL

Adapun jumlah penduduk Kabupaten Natuna pada pertengahan tahun 2011 adalah 72.521 jiwa, sehingga pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku tahun 2011 adalah Rp. 15.486.224,55. Angka tersebut menggambarkan besarnya pendapatan rata-rata penduduk di Kabupaten Natuna pertahunnya.

Namun untuk melihat kemakmuran masyarakat Kabupaten Natuna aspek pemerataan pendapatan merupakan hal penting untuk diperhatikan. Perhitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai *proxy* pendapatan. Meskipun hal ini tidak dapat langsung mencerminkan keadaan yang sebenarnya, namun paling tidak dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat arah perkembangan yang terjadi.

Untuk mengetahui tingkat ketimpangan pendapatan beberapa ukuran telah dikembangkan oleh beberapa peneliti dan masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Sungguhpun demikian, ukuran yang paling sering digunakan adalah Rasio Gini dan kriteria dari Bank Dunia. Ketimpangan pendapatan dengan menggunakan kedua ukuran tersebut dapat juga digambarkan secara visual dengan *Kurva Lorenz*. Melalui kurva ini dapat diketahui persentase pendapatan yang diterima oleh setiap golongan penduduk pada daerah penelitian.

Grafik 8.2 Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Natuna Tahun 2007-2011



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna

Pada tahun 2011 dari hasil perhitungan diperoleh Rasio Gini Kabupaten Natuna sebesar 0,33. Dengan nilai sebesar ini, bisa dikatakan pada tahun 2011 tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Natuna relatif merata atau tingkat ketimpangan relatif rendah. Assesmen ini mengacu pada kriteria Rasio Gini bahwa jika nilainya antara 2,00 sampai 3,50 berarti ketimpangan pendapatan dianggap rendah (Oshima:1975).

Secara kriteria dari tahun 2007 sampai 2010 tingkat ketimpangan di Kabupaten Natuna secara konsisten relatif rendah. Relatif meratanya tingkat pendapatan di Kabupaten Natuna, diduga karena sebagian besar penduduk di kabupaten

PENGELUARAN KONSUMSI DAN PENDAPATAN REGIONAL

ini berprofesi sebagai petani yang relatif seragam penghasilannya. Dalam rangka menjadikan tingkat ketimpangan pendapatan konsisten rendah, maka diperlukan langkah yang menjamin agar terjadi percepatan yang relatif sama antar kelas pendapatan yang rendah maupun yang tinggi.

Penaksiran distribusi pendapatan yang diterima oleh masing-masing golongan penduduk dapat juga dilakukan dengan membagi kelompok-kelompok pendapatan kedalam kelas pendapatan yang sama (desil). Hasil dari pengelompokan ini akan menggambarkan distribusi pemerataan pendapatan yang terkenal dengan bentuk *Kurve Lorenz*. Secara grafis, makin dekat kurva pendapatan dengan garis diagonal pada *Kurva Lorenz* mengindikasikan adanya tingkat pemerataan pendapatan yang makin baik.

Selain dengan pendekatan Rasio Gini dan Kurva Lorenz, indikator pemerataan distribusi pendapatan juga bisa menggunakan kriteria dari Bank Dunia. Untuk melihat tingkat keparahan dari ketimpangan, Bank Dunia memberikan criteria untuk mengukur ketimpangan pembagian pendapatan dengan menghitung besarnya bagian pendapatan yang dinikmati oleh empat puluh persen penduduk dalam kelompok yang berpenghasilan terendah. Hal ini sekaligus menjadi salah satu kelemahan penggunaan kriteria Bank Dunia, dimana tidak

PENGELUARAN KONSUMSI DAN PENDAPATAN REGIONAL

mengukur secara menyeluruh distribusi pendapatan masyarakat, tetapi hanya memperhatikan perkembangan pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk termiskin dari *decil* ke-4.

Dari tabel 8.5 di bawah ini dapat dilihat bahwa porsi pendapatan yang diterima oleh empat puluh persen penduduk berpendapatan rendah sebesar 26,39 persen pada tahun 2007 meningkat menjadi 22,40 persen pada tahun 2008, terjadi penurunan menjadi 20,76 persen pada tahun 2009. Selanjutnya terjadi peningkatan selama dua tahun berturut-turut yaitu 21,08 persen pada tahun 2010 dan 21,44 persen pada tahun 2011.

Meskipun angka porsi pendapatan berfluktuasi, tetapi perubahannya tidak terlalu signifikan sehingga dapat dikatakan relatif konstan. Angka tersebut masih berada dalam kisaran 20 persen sampai 26 persen. Porsi pendapatan seperti ini menunjukkan bahwa Kabupaten Natuna berada pada tingkat ketimpangan distribusi pendapatan rendah, karena berdasarkan kriteria Bank Dunia tingkat ketimpangan disebut rendah bila porsi pendapatan yang diterima oleh empat puluh persen penduduk berpendapatan rendah adalah lebih besar dari tujuh belas persen dari total pendapatan, sedangkan di Kabupaten Natuna besarnya relatif jauh lebih tinggi dari tujuh belas persen tersebut.

PENGELUARAN KONSUMSI DAN PENDAPATAN REGIONAL

Pada tingkat pendapatan menengah (40 persen penduduk berpendapatan sedang) trennya terlihat fluktuatif pada tahun 2007 - 2011. Besarnya persentase penduduk pada kelompok ini menjadi suatu indikasi bahwa mayoritas penduduk di Kabupaten Natuna pendapatannya mengelompok pada tingkat pendapatan menengah. Selama periode 2007 sampai 2011 pencapaian tertinggi persentase penduduk berpenghasilan menengah dicapai pada tahun 2009 dengan dengan besaran 53,69 persen sedangkan tahun 2010 turun menjadi 43,10 persen dan kembali turun pada tahun 2011 menjadi 33,18 persen.

Sementara itu pada kelompok pendapatan tinggi sama halnya dengan kelompok lainnya terjadi fluktuasi. Jika pada tahun 2010 sekitar 20 persen penduduk menerima 35,82 persen dari total pendapatan, maka pada tahun 2011 sedikit mengalami peningkatan menjadi 45,38 persen. Jadi kalau dilihat lebih seksama pada periode 2007-2011 ini, naiknya angka Rasio Gini pada tahun 2011 (0,33) dibanding tahun 2010 (0,29) lebih dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi pada penduduk berpendapatan tinggi menjadi golongan pendapatan menengah.

Begitu juga yang terjadi pada golongan penduduk berpendapatan rendah, persentase penduduk ini meningkat

PENGELUARAN KONSUMSI DAN PENDAPATAN REGIONAL

sehingga gap pendapatan penduduk yang tinggi dengan penduduk berpendapatan rendah menjadi lebih kecil.

Tabel 8.5 Pemerataan Pendapatan Kabupaten Natuna dengan Kriteria Bank Dunia Tahun 2007-2011

Tahun	40% Pengeluaran Rendah	40% Pengeluaran Sedang	20% Pengeluaran Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)
2011	21,44	33,18	45,38
2010	21,08	43,10	35,82
2009	20,76	53,69	25,55
2008	22,40	35,89	41,70
2007	26,39	43,42	30,19

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Natuna